PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET TETAP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Terapan
Jurusan Administrasi Bisnis

DISUSUN OLEH :

NAMA	**:**	**MAULANA MALIK IBRAHIM**
NPM	**:**	**1732033156**
JURUSAN	**:**	**ADMINISTRASI BISNIS**
PROGRAM STUDI	**:**	**ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TAHUN 2021

POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA	:	MAULANA MALIK IBRAHIM
NPM	:	1732033156
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI	:	PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET TETAP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 24 November 2021

Pembimbing

Dr. Luki Karunia, SE.Ak., MA

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada

Ketua merangkap anggota,

(Agoes Inarto)

Sekretaris merangkap anggota

(Keisha Dinya S.)

Anggota

(Luki Karunia)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulana Malik Ibrahim

NPM : 1732033156

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah telah saya buat dengan judul Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis,

(Maulana Malik Ibrahim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Luki Karunia, SE.Ak., MA. selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan, saran dan ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan ide dan gagasan dalam penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Bapak Drs. Agoes Inarto, M.M., dosen pembimbing akademik Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang dengan penuh semangat memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
3. Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Kemenko PMK yang telah memberikan izin

kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait inventarisasi asset tetap.

4. Bapak M. Yusuf Asnani, S.Kom dan Bapak Taufik Hidayat serta rekan-rekan dari Biro Umum dan SDM yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
5. Bapak Maulana Adhi Kurniawan dari Inspektorat dan Bapak M. Ihram dari KPKNL Jakarta III yang telah menjadi informan kunci dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
6. Novi Liviyana Yul Vita, Amanda Arsyila Ibrahim dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan kuliah jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis terutama dalam inventarisasi aset tetap. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Umum dan SDM serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

(MMI)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maulana Malik Ibrahim

NPM : 1732033156

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah telah saya buat dengan judul Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jakarta, Desember 2021

Penulis,

(Maulana Malik Ibrahim)

ABSTRAK

Maulana Malik Ibrahim, 1732033156
PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET TETAP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Skripsi, xi hlm, 88 halaman

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dengan fokus penelitian untuk mengetahui apakah pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah berjalan baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam aspek pendataan, data DBR dan DBL tidak update pada aplikasi SIMAK BMN dan banyak ruangan yang belum memiliki DBR. Dalam aspek pencatatan, kurangnya SDM yang melakukan inventarisasi, belum terbentuknya tim inventarisasi dan penanggung jawab ruang, pencatatan masih dilakukan di Microsoft excel dan belum dilakukan penempelan label registrasi sementara. Kemudian, dalam aspek pelaporan hasil pendataan BMN, laporan hasil inventarisasi belum disusun karena proses inventarisasi belum selesai.

Terkait permasalahan di atas, penulis menyarankan dalam aspek pendataan, untuk mengupdate data pada aplikasi SIMAK BMN. Dalam aspek pencatatan, agar dibentuk Tim Inventarisasi dan Penanggung Jawab Ruangan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan inventarisasi aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016. Kemudian, dalam aspek pelaporan hasil pendataan BMN untuk segera menyelesaikan proses inventarisasi supaya laporan hasil inventarisasi dapat segera disusun dan ditindaklanjuti.

Kata kunci: Pelaksanaan, Inventarisasi, Aset Tetap

ABSTRACT

Maulana Malik Ibrahim, 1732033156

IMPLEMENTATION OF FIXED ASSETS INVENTORY IN THE COORDINATING MINISTRY FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURE

Thesis, xi pages, 88 pages

This research is entitled "Implementation of Fixed Assets Inventory at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture" with the focus of research to determine whether the implementation of fixed asset inventories in the Coordinating Ministry for Human Development and Culture has been running well or not in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the implementation of an inventory of fixed assets at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, which was viewed from three aspects, namely data collection, recording and reporting of the results of data collection on State Property.

The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review. The research instrument used was an interview guide and a document review guide.

Based on the research conducted, it shows that in the aspect of data collection, DBR and DBL data are not updated in the SIMAK BMN application and many rooms do not have DBR. In the aspect of recording, the lack of human resources who carry out the inventory, the inventory team and the person in charge of the room have not been formed, the recording is still done in Microsoft excel and the temporary registration label has not been attached. Then, in the aspect of reporting the results of BMN data collection, the report on the results of the inventory has not been prepared because the inventory process has not been completed.

Regarding the problems above, the author suggests in the aspect of data collection, to update the data on the SIMAK BMN application. In the aspect of recording, in order to form an Inventory Team and Person in Charge of the Room, training to increase the capacity of human resources, and the implementation of an inventory of fixed assets based on the Regulation of the Minister of Finance Number 181 of 2016. Then, in the aspect of reporting the results of BMN data collection to immediately complete the inventory process so that the results report inventory can be immediately compiled and followed up.

Keywords: Implementation, Inventory, Fixed Assets

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN **1**
A. Latar Belakang Permasalahan 1
B. Fokus Permasalahan 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II KERANGKA TEORI **10**
A. Tinjauan Teori 10
1. Teori Administrasi 11
2. Konsep Manajemen 11
3. Konsep Aset 13
4. Barang Milik Negara 17
5. Manajemen Aset Pemerintah 20
6. Penatausahaan Barang Milik Negara 33
7. Pembukuan 34
8. Inventarisasi 35
9. Pelaporan 47
10. Penelitian Terdahulu 48
B. Konsep Kunci 59
C. Model Berpikir 60
D. Pertanyaan Penelitian 61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **62**

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

A. Metode Penelitian 62
B. Teknik Pengumpulan Data 63
1. Wawancara 64
2. Penelaahan Dokumen 65
C. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data 66
BAB IV HASIL PENELITIAN 68
A. Deskripsi Objek Penelitian 68
1. Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 68
2. Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Periode 2019 - 2024 70
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 70
4. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 72
B. Penyajian dan Analisis Data Hasil Penelitian 76
1. Aspek Pendataan 76
2. Aspek Pencatatan 80
3. Aspek Pelaporan Hasil Pendataan Barang Milik Negara 83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Pengelolaan BMN/D 22
Gambar 2. Proses Pencatatan dan Pendaftaran BMN ke Daftar Barang 35
Gambar 3. Diagram Penggolongan BMN 41
Gambar 4. Bagan Akun Standar 41
Gambar 5. Model Berpikir 60
Gambar 6. Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 75
Gambar 7. Tampilan Halaman Menu Aplikasi SIMAK BMN 77
Gambar 8. Tampilan Menu Pembelian 78
Gambar 9. Tampilan Menu Input Data Pembelian 79

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6
Tabel 2. Rekapitulasi BMN Berupa Peralatan dan Mesin Yang Belum Didistribusikan ke Dalam Daftar Barang Ruangan 6
Tabel 3. Rekapitulasi BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Belum Didistribusikan ke Dalam Daftar Barang Lainnya 7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu 49
Tabel 5. Daftar *Key Informant* 64

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 1 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar aset yang dimiliki dapat mendukung tugas dan fungsi suatu instansi dibutuhkan pengelolaan aset yang baik. Pengelolaan aset merupakan kegiatan yang memiliki rangkaian kegiatan yang cukup kompleks. Dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Semua rangkaian pengelolaan aset ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pengelolaan aset pemerintah berjalan tertib dan optimal. Namun, dalam perjalanan melakukan pengelolaan aset, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pasti menghadapi berbagai macam masalah, antara lain banyaknya aset yang dimiliki suatu instansi, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, hingga kurangnya kesadaran akan rasa kepemilikan. Oleh karena itu, setiap rangkaian kegiatan pengelolaan aset hendaknya dilaksanakan dengan baik.

Salah satu rangkaian pengelolaan aset adalah penatausahaan, yang didalamnya terdapat proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang. Sedangkan inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara. Lalu pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data informasi Barang Milik Negara secara semesteran dan tahunan. Penatausahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Negara yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 4, objek Penatausahaan Barang Milik Negara meliputi:

1. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
   a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
   b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
   c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
   d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari keterangan di atas, objek Penatausahaan Barang Milik Negara dapat diklasifikasikan menjadi:

1. aset lancar berupa barang persediaan;
2. aset tetap, meliputi:
   a. tanah;
   b. peralatan dan mesin;
   c. gedung dan bangunan;

d. jalan, irigasi dan jaringan;
e. aset tetap lainnya; dan
f. konstruksi dalam pengerjaan; dan

3. aset lainnya, meliputi:
   a. aset kemitraan dengan pihak ketiga;
   b. aset tak berwujud; dan
   c. aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri atas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang), UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah), UAPPB-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1) dan UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang). Apabila diperlukan, UAKPB dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB). UAKPB bertanggung jawab terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) di lingkungannya. Sedangkan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pelaksana Penatausahaan yang terdiri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pengelola Barang kantor daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang kantor wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang.

Sekilas menjelaskan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibentuk pada masa

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satu fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Sejak tahun 2009, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat temuan terkait penatausahaan Barang Milik Negara yang berulang-ulang mengenai Barang Milik Negara yang belum didistribusikan sejak tahun 2007 - 2019 ke dalam Daftar Barang Ruang yang berjumlah 2.167 unit dan Daftar Barang Lainnya yang berjumlah 2.619 unit, temuan ini akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun mendatang. Penelitian ini tidak membahas pengelolaan Barang Milik Negara secara keseluruhan namun penulis membatasi fokus penulisan pada pengelolaan Barang Milik Negara dari sisi inventarisasi aset tetap. Penulis menitikberatkan fokus penulisan pada aset tetap karena masih terdapat temuan BPK terkait aset tetap berupa

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

peralatan dan mesin yang belum didistribusikan ke dalam Daftar Barang Ruang.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 30B/HP/XVI/5/2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan nilai aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp 161.355.993.433,- dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1. Terdapat 2.167 unit BMN senilai Rp 27.508.875.200,- berupa peralatan dan mesin yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Ruangan yang dapat dilihat rekapitulasinya pada tabel 2. Terdapat juga 2.619 unit BMN senilai Rp 11.013.553.054,- berupa peralatan dan mesin terhitung sejak tahun 2007 sampai 2019 yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Lainnya yang dapat kita lihat rekapitulasinya pada tabel 3. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap data BMN yang dicatat/dibukukan dalam aplikasi SIMAK BMN diketahui terdapat sejumlah 4.753 unit barang senilai Rp 42.357.184.165,- atau 55% dari total peralatan dan mesin yang pencatatan kode barangnya tidak dilengkapi dengan Kode Ruangan/Lokasi. Hal ini berakibat keberadaan BMN sulit ditelusuri lokasi penempatannya, ketidakjelasan penanggung jawab operasioal atas pengendalian dan pengamanan BMN serta BMN berisiko hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	77.037.679.564
2	Gedung dan Bangunan	154.040.207.650
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.386.000
4	Aset Tetap Lainnya	857.168.592
5	Akumulasi Penyusutan	(70.723.448.373)
Jumlah Aset Tetap		**161.355.993.433**

Sumber. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 Nomor 30B/HP/XVI/5/2020

Tabel 2. Rekapitulasi BMN Berupa Peralatan dan Mesin Yang Belum Didistribusikan ke Dalam Daftar Barang Ruangan

No.	Tahun Perolehan	Jumlah		Nilai (Rp)
1	2019	331	Unit	2.938.403.150
2	2018	159	Unit	1.244.097.229
3	2017	379	Unit	3.629.443.886
4	2016	393	Unit	4.175.123.570
5	2015	551	Unit	6.537.281.042
6	2013	208	Unit	7.123.750.000
7	2012	23	Unit	740.740.000
8	2011	12	Unit	412.621.000
9	2010	74	Unit	457.515.323
10	2008	12	Unit	10.200.000
11	2007	25	Unit	239.700.000
	Jumlah	**2.167**	**Unit**	**27.508.875.200**

Sumber. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 Nomor 30B/HP/XVI/5/2020

Tabel 3. Rekapitulasi BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Belum Didistribusikan ke Dalam Daftar Barang Lainnya

No.	Tahun Perolehan	Jumlah		Nilai (Rp)
1	2019	47	Unit	1.420.549.070
2	2018	9	Unit	448.635.000
3	2017	105	Unit	592.786.679
4	2016	32	Unit	138.508.690
5	2014	7	Unit	897.330
6	2012	2.375	Unit	6.746.527.635
7	2009	1	Unit	197.988.450
8	2008	42	Unit	687.353.500
9	2007	1	Unit	780.306.700
	Jumlah	**2.619**	**Unit**	**11.013.553.054**

Sumber. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 Nomor 30B/HP/XVI/5/2020

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diketahui penatausahaan Barang Milik Negara belum memadai karena masih terdapat Barang Milik Negara yang tidak mencantumkan kode ruang/lokasi penempatan dan juga terdapat Barang Milik Negara yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap**

di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan".

B. Fokus Permasalahan

Kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/ penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi salah satu fokus utama dalam terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Aset tetap merupakan kelompok terbesar dari BMN dibandingkan dengan aset lancar dan aset lainnya, bahkan aset tetap merupakan komponen terbesar dalam neraca Pemerintah Pusat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang tertulis dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, "Bagaimana Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?"

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi aset tetap pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pelaksanaan inventarisasi aset tetap secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Akademik

   Penelitian ini sebagai wujud penerapan dan pengembangan ilmu yang sudah didapatkan selama belajar di sekolah tinggi. Peneliti juga berharap dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Kepentingan Dunia Praktik

   Peneliti berharap dapat memberikan bahan masukan atau rekomendasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memperbaiki proses inventarisasi aset tetap.

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA